

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA DUALASI DAN DESA BAUDAOK DI KECAMATAN LASIOLAT KABUPATEN BELU

Alfrida Bitu, Muhammad Rifai, Willy Tri Hardianto

Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang, Indonesia

*Corresponding Author:
Alfrida Bitu

Abstract

PKH is a conditional assistance program overseen by the Ministry of Social Affairs. This program began to be implemented in 2007. PKH opens access to poor families, especially pregnant women, toddlers and school-age children, to utilize various health service facilities (faskes) and education service facilities (fasdik) available around them. The aim of this research is to determine the evaluation of the Family Hope Program Policy in Dualasi and Baudaok Villages in Lasiolat District, Belu Regency. And to find out the supporting and inhibiting factors for the Family Hope Program in Dualasi Village and Baudaok Village in Lasiolat District, Belu Regency. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The data collection techniques used in this research are observation, interviews and documentation. The analysis technique used in this research is a qualitative descriptive method by collecting data, compiling and analyzing it, drawing conclusions supported by expert opinions and literature study theory. The research results show that the evaluation of PKH in Dualasi Village and Baudaok Village is based on various aspects, namely context, input, process and product. Based on the research results, it can be seen that in the evaluation of PKH in the communities of Dualasi Village and Baudaok Village which consists of context, input, process and product, education and health have been fulfilled. The assistance provided has been able to ease the burden on RTSM families and given them the opportunity to break the cycle of poverty. In the context of supporting factors for implementing the Family Hope Program (PKH), the role of village government has great significance in providing support. The inhibiting factor in implementing PKH in Dualasi and Baudaok villages, Lasiolat District, Belu Regency is the indiscipline of PKH recipients in attending socialization meetings. PKH KPMs who attend the socialization are also sometimes not serious about following the material so they don't understand the procedures that are taking place. Apart from that, KPM became too dependent on this program so they lost their enthusiasm for work. Apart from that, inappropriate use of aid funds can hinder the success of PKH.

Keywords; Evaluation of PKH, poverty, KPM

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini adalah bahwa masih ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara, akibatnya masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat, kurangnya kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan dan kesehatan, rendahnya kemampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kurangnya jaminan untuk dari ketidakberdayaan sehingga menyebabkan kondisinya menjadi sangat miskin (Siregar,2018)

Kemiskinan merupakan masalah serius yang dialami oleh sebagian negara di dunia, termasuk Indonesia. Maka dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 telah menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH). Seperti diatur dalam pasal 1 ayat (9) UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menentukan bahwa perlindungan sosial adalah semua upaya untuk yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial

Pemerintah perlu memperhatikan adanya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Karena berdasarkan data yang dirilis Oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah pelajar Indonesia yang putus sekolah masih sangat tinggi (Syamsuri, 2020)

Menanggapi pernyataan di atas, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program bantuan. Salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan bersyarat yang dinaungi oleh Kementerian Sosial. Program ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2007. PKH membuka akses kepada keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak balita maupun anak usia sekolah untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya (Nurrohman, 2019)

Untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan dan pendidikan di Indonesia, pemerintah mengadakan berbagai program yang berlaku secara nasional. Diharapkan dengan adanya program-program tersebut dapat mempercepat pembangunan baik fisik maupun non fisik. Pembangunan tersebut ditujukan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata sesuai yang diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV Program yang sampai saat ini menjadi andalan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan pendidikan di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan mulai diterapkan pada tahun 2007 sebagai upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui perbaikan mutu dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Program ini terinspirasi dari program yang dikenal di dunia Internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) (Mulyadi, 2017)

Semakin besar jumlah anak usia sekolah yang tidak mampu memperoleh pendidikan yang layak akan memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada masa yang akan datang dan mengakibatkan beban sosial yang sangat tinggi terhadap negara. Penanganan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia ini kemungkinan akan semakin sulit diatasi. Hal ini disebabkan karena sempitnya lapangan pekerjaan serta rendahnya pendapatan masyarakat miskin memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Selain itu, mahal biaya pendidikan menyebabkan masyarakat miskin semakin sulit untuk mengenyam dunia pendidikan yang pada akhirnya akan dapat menyebabkan turunnya kualitas sumber daya manusia, maka hal ini juga diperlukan tentang adanya pemberdayaan dari keluarga (Hermawati, 2015)

Tingginya jumlah Masyarakat Miskin di Belu melatar belakangi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu untuk menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH). Kabupaten Belu adalah sebuah kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten ini beribu kota di Atambua. Memiliki luas wilayah 1.284,94 km² (menurut BPS) atau 1.284,97 km² (menurut Kemendagri), terbagi dalam 12 kecamatan, 12 kelurahan dan 69 desa, termasuk 30 desa dalam 8 kecamatan perbatasan. Dengan adanya program Keluarga Harapan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat miskin untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan atau fasilitas pendidikan yang ada di sekitar mereka. Cara kerja dari sistem ini adalah bantuan dari pemerintah akan diberikan pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), sebagai timbal balik dari hal tersebut maka masyarakat wajib untuk menyekolahkan anak-anak mereka dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Kabupaten Belu mulai menjalankan program PKH ini pada tahun 2007, namun Kecamatan Lasiolat Mulai menjalankan PKH pada tahun 2014. terdapat beberapa perubahan dalam permasalahan pendidikan atau kesehatan di Kecamatan Lasiolat. Di sektor kesehatan contohnya, sejak diberlakukan PKH ini Angka Kematian Bayi di Kecamatan Lasiolat

mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sayangnya, perbaikan pada sektor kesehatan belum diikuti oleh perbaikan pada sektor pendidikan. Berikut data tabel Masyarakat Desa Dualasi dan Desa Baudaok yang menerima bantuan PKH

Gambar Tabel 1. Penerima bantuan PKH Desa Dualasi dan Desa Baudaok

No	Desa	Jenis Kelamin	Jumlah PKM PKH	%	Jumlah total PKM PKH
1	Dualasi	Perempuan	70	92,31	76
		Laki-Laki	6	7,89	
2	Baudaok	Perempuan	48	92,31	52
		Laki-Laki	4	7,69	

Sumber: Data Di Kelola Tahun 2023

Berdasarkan berdasarkan data tabel diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Dualasi Dan Desa Baudaok Di Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu.”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Melalui jenis penelitian ini, penulis bermaksud untuk menggambarkan bagaimana pencapaian pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Dualasi Dan Desa Baudaok Di Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu.

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan seumber data yaitu:

1. Data Primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan narasumber terkait dengan Evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Dualasi Dan Desa Baudaok Di Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu.

2. Data Sekunder

Data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1 Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Dualasi Dan Desa Baudaok Di Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu untuk mengamati secara langsung bagaimana hasil pelaksanaan Program Keluarga Harapan di daerah tersebut.

2 Wawancara

.Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Dualasi Dan Desa Baudaok Di Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu, khususnya penerima manfaat PKH.

3 Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa, dokumen-dokumen yang ada di Desa Dualasi Dan Desa Baudaok Di Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data, menyusun, dan menganalisa mengambil kesimpulan yang didukung oleh pendapat dari ahli dan teori studi kepustakaan. Menurut (Sugiyono, 2017) analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Dualasi di Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu.

Dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Dualasi, beberapa indikator telah disusun untuk menganalisis kendala dalam menjalankan program PKH. Peneliti melaksanakan evaluasi menggunakan model evaluasi yang dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk. (1967) di *Ohio State University*, yakni: *CIPP Evaluation Model*.

Tabel 2. Indikator Penilaian Program PKH

No	Aspek	Indikator
1	Konteks	a. Kebutuhan yang harus dipenuhi program b. Tujuan program yang dicapai
2	Masukan	c. Jumlah penerima PKH d. Reaksi program terhadap penerima e. Peningkatan prestasi siswa
3	Proses	f. Pelaksanaan sesuai agenda g. Tenaga pendamping h. Proses pengawasan dan keterlibatan unsur intern dan ekstern
4	Hasil	i. Pencapaian tujuan j. Dampak program

(Sumber: Susilo & Suyono, 2019)

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dualasi dilaksanakan rutin dengan harapan keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) akan dapat membantu RTSM. Evaluasi PKH di Desa Dualasi dilaksanakan dengan menggunakan CIPP Evaluation Model, yang dikembangkan oleh Stufflebeam, berikut ini uraiannya:

1. Evaluasi Konteks (*context evaluation*)

Model evaluasi konteks bertujuan untuk menggambarkan secara detail lingkungan dan kebutuhan yang telah terpenuhi. Dalam konteks ini, peneliti menemukan bahwa beberapa

Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) telah mengidentifikasi kebutuhan yang terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH), terutama dalam dua aspek utama: Pendidikan dan Kesehatan. Meskipun kedua aspek ini telah memberikan banyak manfaat bagi sebagian besar warga, namun ada juga sebagian RTSM/KSM yang tidak merasakan manfaatnya. Temuan ini diungkapkan melalui hasil wawancara sebagai berikut:

Puji Tuhan, saya bersyukur telah menerima dukungan untuk pendidikan dan kesehatan anak-anak saya. Anak-anak saya sekarang dapat menerima perawatan di puskesmas ketika sakit, berkat bantuan yang diberikan oleh Program Keluarga Harapan (wawancara, AIF/12/01/2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui dalam evaluasi konteks PKH di masyarakat Desa Dualasi kebutuhan komponen pendidikan dan Kesehatan telah terpenuhi, meskipun beberapa RTSM telah merasa cukup terbantu dengan bantuan yang diberikan, ada juga sebagian warga yang masih merasa bahwa bantuan tersebut belum mencukupi. Hal ini terutama karena mereka masih harus mengeluarkan biaya tambahan setiap bulannya untuk keperluan pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam evaluasi konteks PKH di masyarakat Desa Dualasi kebutuhan komponen pendidikan dan Kesehatan telah dapat terpenuhi. Beberapa RTSM memang merasa belum cukup terbantu dengan bantuan yang diberikan, namun tidak dapat dipungkiri dengan adanya program secara ekonomi dapat membantu meringankan beban biaya untuk Pendidikan dan Kesehatan keluarga. Dengan kata lain, bantuan yang diberikan telah mampu meringankan beban keluarga RTSM dan memberikan peluang mereka untuk dapat memutus rantai kemiskinan.

2. Evaluasi Masukan (*Input evaluation*)

Langkah kedua dari model CIPP ini melibatkan evaluasi masukan. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi jumlah peserta PKH yang merupakan RTSM. Dari seluruh penduduk miskin di Desa Dualasi, Kecamatan Lasiolat, hanya 76 orang yang terdaftar sebagai peserta PKH. Informasi tentang evaluasi masukan ini didapatkan dari hasil wawancara sebagai berikut.

Kalau di sini Dualasi, setahu saya yang dapat bantuan PKH ini tidak sampai seratus, ibu. Padahal, yang butuh sebenarnya ya lebih banyak daripada itu. Di samping rumah itu anaknya banyak, rumahnya juga miskin tapi tidak dapat. Tapi, yang disebelah kali sana rumah sudah lumayan bagus tapi anaknya bisa dapat PKH (wawancara, AIF/12/01/2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui dalam evaluasi masukan PKH di masyarakat Desa Dualasi kebutuhan komponen evaluasi masukan telah terpenuhi. Hal tersebut diperkuat dengan jumlah penerima manfaat PKH yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Desa Dualasi. Hasil penelitian menunjukkan, sebanyak 76 orang di Desa Dualasi yang menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka merasa sangat bersyukur mendapatkan bantuan ini karena dapat membantu mengurangi beban biaya pendidikan anak-anak mereka. Akibatnya, siswa yang menerima manfaat dari PKH merasa lebih termotivasi untuk pergi ke sekolah karena tidak perlu terlalu khawatir tentang biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua mereka.

Tabel 3 Matrik CIPP Evaluasi masukan Program Keluarga Harapan di Desa Dualasi

Komponen	Sub Komponen	Penilaian
Masukan	a. Jumlah penerima PKH b. Reaksi program terhadap penerima c. Peningkatan prestasi siswa	a. Jumlah penerima bantuan PKH di Desa Dualasi berjumlah 76 orang saja, jumlah penerima akan diupayakan dapat dimaksimalkan sehingga penerima manfaat PKH akan semakin luas b. Program Keluarga Harapan dapat diterima dengan baik meskipun masih terdapat penerima manfaat yang tidak layak karena tidak termasuk keluarga miskin c. Dengan adanya PKH maka siswa jadi lebih giat ke sekolah yang akan berpengaruh pada pendidikannya sehingga siswa menjadi lebih terpelajar

(Sumber: Data Peneliti diolah, 2024)

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa di Desa Dualasi evaluasi masukan Program Keluarga Harapan telah dilaksanakan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan penerima manfaat yang merasa sangat terbantu dengan adanya program Keluarga Harapan.

3. Evaluasi Proses (*Process evaluation*)

Evaluasi proses dalam model CIPP mengungkapkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pendamping dalam program. Penelitian ini menemukan berbagai tahapan dalam pelaksanaan PKH, termasuk pertemuan awal, pencairan bantuan, dan verifikasi. Beberapa tahapan ini melibatkan interaksi langsung antara RTSM/KSM, pendamping, dan program. Hal ini tercermin dalam hasil wawancara sebagai berikut:

Kalau kami di Dualasi, ada pertemuan dengan pendamping Ketika nama kita tercantum menjadi penerima PKH, itu kami dikasih tahu semua seluk-beluk nantinya uang PKH digunakan untuk apa. Pada saat pencairan bantuan, pendamping PKH juga selalu siap memberikan bantuan tanpa pamrih, karena ada to mama-mama mereka itu yang tidak bisa baca tulis sehingga harus didampingi (wawancara, AIF/12/01/2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui di dalam evaluasi proses PKH di masyarakat Desa Dualasi kebutuhan komponen evaluasi proses telah terpenuhi. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pendampingan penuh dari pendamping PKH di Kecamatan Lasiolat untuk membantu penerima manfaat PKH. Masyarakat dapat mencairkan bantuan di kantor pos dengan didampingi oleh pendamping PKH. Pendampingan oleh pendamping PKH pada penerima manfaat PKH dikarenakan tingginya angka buta huruf sehingga mereka membutuhkan bantuan dalam mencairkan bantuan PKH di Kantor Pos. Pendamping selalu melakukan pengawasan

dengan memverifikasi setiap RTSM setelah proses pencairan selesai dilakukan. Verifikasi ini mencakup pemeriksaan pendidikan oleh pihak sekolah dan kesehatan oleh pihak puskesmas, sesuai dengan panduan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan

Evaluasi terhadap proses pelaksanaan program menunjukkan bahwa jadwal program terpenuhi dengan baik. Setiap jadwal pencairan bantuan per/tiga bulan sekali tepat waktu. Adapun besaran bantuan setiap dari pencairan masing-masing anggota RTSM sangat variatif tergantung dari penerima manfaat yang memiliki hak menerima bantuan PKH. Sebelum pencairan, terdapat pertemuan dengan ibu-ibu penerima bantuan PKH untuk melakukan persiapan. tenaga pendamping PKH selalu siap sedia membantu kesulitan yang dihadapi oleh penerima manfaat PKH. Para pendamping PKH yang mendampingi penerima manfaat PKH di Desa Dualasi ini memiliki latar belakang pendidikan minimal setara dengan gelar Sarjana (S1).

4. Evaluasi Hasil (*Product Evaluation*)

. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil. Oleh karena itu, evaluasi ini difokuskan pada dampak keseluruhan suatu program terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM). Selama evaluasi hasil, peneliti menemukan bahwa Program Keluarga Harapan di Desa Dualasi, Kecamatan Lasiolat, memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kondisi sosial-ekonomi RTSM/KSM secara keseluruhan. Pandangan ini ditegaskan oleh Ibu AIF dan PA, dua penerima manfaat PKH yang termasuk dalam RTSM/KSM, dalam wawancara berikut.

kalau dampaknya PKH ini ya kami yang miskin ini terbantu, Ibu. tadinya yang kami tidak bisa beli lauk untuk adek jadi bisa, gizinya terpenuhi. Tadinya yang anak tidak sekolah karena tidak ada sepatu jadi bisa berangkat dan punya uang saku. Ini rumah juga mau roboh begini jadi mana mikir lagi mau beli ulang sepatu. Untung saja tiba-tiba cair itu PKH jadi anak bisa pake beli sepatu dan tidak kena olok temannya lagi karena tidak pakai sepatu ke sekolah (wawancara, AIF/12/01/2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui di dalam evaluasi hasil PKH di masyarakat Desa Dualasi kebutuhan komponen evaluasi hasil telah terpenuhi. Meskipun UPPKH Kecamatan Lasiolat berhasil dalam implementasi programnya, pada sisi lain, evaluasi hasil mengungkap bahwa peneliti menemukan dampak negatif berupa ketergantungan yang tinggi dari beberapa RTSM/KSM pada program ini.

Evaluasi hasil menunjukkan Program Keluarga Harapan yang dijalankan oleh UPPKH Kecamatan Lasiolat berhasil, namun menyebabkan ketergantungan yang tinggi dari RTSM/KSM terhadap bantuan tersebut. Meskipun demikian, pelayanan yang diberikan oleh UPPKH Kecamatan Lasiolat telah memberikan banyak manfaat bagi RTSM. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar program ini tetap berlanjut, mengingat bahwa pelaksanaannya sesuai dengan harapan dan memberikan manfaat yang signifikan.

Faktor pendukung dan penghambat Program Keluarga Harapan di Desa Dualasi Dan Desa Baudaok Di Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu

Faktor-faktor yang mendukung Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dualasi Dan Desa Baudaok Di Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dukungan yang pasti datang dari Pemerintah, karena Pemerintah berusaha mengurangi beban bagi masyarakat dengan ekonomi rendah. Namun, ketiadaan dorongan dan bantuan dari pemerintah berarti banyak anak yang tidak dapat mengakses pendidikan karena orang tua mereka tidak bekerja (wawancara, SMM/12/01/2024).

Dari pernyataan dalam wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran penting pemerintah dalam memperhatikan masyarakat yang kurang mampu terlihat melalui pemberian bantuan tunai melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Kepala desa juga turut mendukung

masyarakatnya yang kurang mampu dengan memberikan bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tepat sasaran. Analisis ekonomi terhadap pelaksanaan PKH bertujuan untuk mengurangi beban finansial rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Masyarakat yang kurang mampu atau miskin sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan non-pangan seperti pendidikan, kesehatan, listrik, pembayaran sewa rumah, dan lain-lain. Pemerintah menyadari bahwa biaya-biaya tersebut terlalu tinggi dan memberatkan bagi rumah tangga miskin, sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran guna membantu masyarakat penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Dalam konteks faktor pendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), peran pemerintah desa memiliki signifikansi yang besar dalam memberikan dukungan, termasuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna mendukung kelancaran program PKH. Dukungan ini mencakup aspek finansial yang memadai serta penyediaan fasilitas dan sarana untuk kegiatan sosialisasi yang rutin dilakukan oleh pendamping PKH dan peserta PKH. Melalui dukungan dari pihak-pihak terkait tersebut, diharapkan program PKH dapat berhasil dengan baik dan meningkatkan kualitas hidup Rumah Tangga Sasaran (RTSM) di masa yang akan datang.

Faktor-faktor yang penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dualasi Dan Desa Baudoak Di Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mungkin ada beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang jarang menghadiri kegiatan sosialisasi, sehingga mereka tidak memperoleh informasi yang disampaikan dalam setiap pertemuan. Seringkali terjadi juga penyampaian informasi yang salah, sehingga jika terjadi kesalahan pada KPM tersebut, mereka cenderung menyalahkan pendamping, padahal mereka sendiri tidak pernah menghadiri sosialisasi. Selain itu, salah satu hambatannya adalah ketika ada KPM yang tidak memahami materi yang dibahas, namun saat pendamping menjelaskan, mereka lebih tertarik berbincang dengan KPM lain. Ketika terjadi masalah, mereka kemudian tidak memahami dan menyalahkan pendamping yang dianggap tidak menjelaskan dengan baik (wawancara, SMM/12/01/2024).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor penghambat pelaksanaan PKH di desa Dualasi dan Desa Baudoak Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu adalah ketidakdisiplinan penerima PKH dalam menghadiri pertemuan sosialisasi. KPM PKH yang menghadiri sosialisasi juga kadang tidak serius dalam mengikuti materi sehingga tidak mengerti prosedur yang terjadi. Selain itu, KPM menjadi terlalu bergantung pada program ini sehingga kehilangan semangat untuk bekerja. Selain itu, penggunaan dana bantuan yang tidak tepat dapat menghambat keberhasilan PKH.

Sejak tahun 2007, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam mengatasi kemiskinan dan sekaligus mengembangkan kebijakan di bidang perlindungan sosial. Program serupa yang dikenal sebagai *Conditional Cash Transfers* (CCT) di negara lain, diterapkan dalam bentuk bantuan tunai dengan syarat tertentu. PKH bertujuan memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat mereka harus mematuhi ketentuan yang terkait dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Sistem ini menyasar RTSM yang memiliki anggota keluarga dengan rentang usia 0-15 tahun dan ibu hamil. Melalui PKH, diharapkan RTSM penerima bantuan memiliki akses yang lebih baik ke layanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, serta bantuan sosial lainnya, sehingga dapat mengurangi ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang biasanya dialami oleh warga miskin. Sejalan dengan pendapat Susilo dan Suyono (2019) yang menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah satu dari program-program percepatan penanggulangan kemiskinan lewat pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Hal ini

dilaksanakan sebagai usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dengan fokus yaitu bidang kesehatan dan pendidikan.

Penilaian indikator evaluasi PKH di Desa Dualasi dan Desa Baudaok didasarkan pada berbagai aspek, termasuk (*Context*), masukan (*Input*), proses (*Process*), hasil (*Product*). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam evaluasi konteks PKH di masyarakat Desa Dualasi dan Desa Baudaok kebutuhan komponen pendidikan dan Kesehatan telah dapat terpenuhi. Bantuan yang diberikan telah mampu meringankan beban keluarga RTSM dan memberikan peluang mereka untuk dapat memutus rantai kemiskinan. Indikator evaluasi PKH di Desa Dualasi dan Desa Baudaok ini sejalan dengan pendapat Susilo dan Suyono (2019) yang menyebutkan Dalam pelaksanaan PKH, perlu dibuatkan beberapa indikator yang menjadi bahan untuk menggali permasalahan pelaksanaan program. Indikator penilaian didasarkan pada aspek – aspek konteks (*Context*), masukan (*Input*), proses (*Process*), hasil (*Product*).

Di Desa Dualasi dan Desa Baudaok evaluasi masukan Program Keluarga Harapan telah dilaksanakan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan penerima manfaat yang merasa sangat terbantu dengan adanya program Keluarga Harapan. Masyarakat berharap bahwa program akan dilaksanakan secara berkelanjutan agar menjamin masa depan mereka yang lebih cerah. Jumlah penerima manfaat PKH di Desa Baudaok perlu ditambahkan dengan membantu masyarakat yang tidak memiliki kelengkapan administrasi untuk mengurus masalah administrasinya. Dengan kelengkapan administrasi maka Namanya akan dapat dimasukkan sebagai calon penerima manfaat PKH.

Evaluasi terhadap proses pelaksanaan program menunjukkan bahwa jadwal program Keluarga Harapan di Desa Dualasi dan Desa Baudaok terpenuhi dengan baik. Setiap jadwal pencairan bantuan tiap trimester. Para pendamping PKH yang mendampingi penerima manfaat PKH di Desa Baudaok ini memiliki latar belakang pendidikan minimal setara dengan gelar Sarjana D3/(S1). Hasil ini sejalan dengan penelitian Susilo dan Suyono (2019) yang menemukan proses dari PKH diantaranya proses pertemuan awal, pencairan bantuan, dan proses verifikasi. Dimana beberapa proses ini adalah proses yang bersentuhan langsung dengan RTSM/KSM dan pendamping. Indikator evaluasi Proses dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan jadwal.

Evaluasi hasil menunjukkan Program Keluarga Harapan yang dijalanka di Desa Dualasi dan Desa Baudaok oleh UPPKH Kecamatan Lasiolat berhasil, namun pada beberapa penerima manfaat yang memiliki etos kerja yang rendah program ini menyebabkan ketergantungan. Meskipun demikian, pelayanan yang diberikan oleh UPPKH Kecamatan Lasiolat telah memberikan banyak manfaat bagi RTSM. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar program ini tetap berlanjut, mengingat bahwa pelaksanaannya sesuai dengan harapan dan memberikan manfaat yang signifikan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Susilo dan Suyono (2019) yang menyatakan evaluasi hasil ini digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dengan demikian, evaluasi diarahkan pada keseluruhan dampak dari suatu program terhadap RTSM / KSM. Pada evaluasi ini peneliti menemukan bahwa secara keseluruhan hadirnya Program Keluarga Harapan sangat membantu sekali terhadap kondisi sosial-ekonomi RTSM / KSM.

Terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH), tujuan yang terperinci dalam pelaksanaan program ini sangat jelas. Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, dengan tujuan akhir mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga miskin. PKH bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek dan memutuskan siklus kemiskinan dalam jangka panjang, sebagaimana disebutkan dalam buku panduan PKH tahun 2016.

Dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dualasi dan Desa Baudaok Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu, sasaran utamanya adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, memiliki

balita, dan anak-anak sekolah dasar dan menengah pertama. PKH didasarkan pada UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang mengartikan perlindungan sosial sebagai upaya untuk mencegah dan mengatasi risiko serta kerentanan sosial. PKH merupakan salah satu program prioritas Kementerian Sosial yang bertujuan meningkatkan akses RTSM terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Susilo & Suyono (2019) yang bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan lancar, terlihat dari tahapan-tahapan seperti pertemuan awal, pendampingan pencairan bantuan, pemutakhiran data, dan verifikasi komitmen peserta. Namun, kekurangan dari PKH ini adalah adanya ketergantungan yang masih dirasakan oleh sejumlah RTSM terhadap bantuan tersebut. Proses pemutakhiran data juga perlu diperbaiki, karena sangat berpengaruh terhadap nominal yang diberikan saat pencairan. Selain itu, kerjasama antara lembaga internal dan eksternal di UPPKH harus ditingkatkan, mengingat PKH adalah program lintas lembaga.

Dalam konteks faktor pendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), peran pemerintah desa memiliki signifikansi yang besar dalam memberikan dukungan, termasuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna mendukung kelancaran program PKH. Dukungan ini mencakup aspek finansial yang memadai serta penyediaan fasilitas dan sarana untuk kegiatan sosialisasi yang rutin dilakukan oleh pendamping PKH dan peserta PKH. Melalui dukungan dari pihak-pihak terkait tersebut, diharapkan program PKH dapat berhasil dengan baik dan meningkatkan kualitas hidup Rumah Tangga Sasaran (RTSM) di masa yang akan datang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Susilo & Suyono (2019) yang menyatakan Keberhasilan program PKH yang dilaksanakan memberikan ketergantungan RTSM terhadap bantuan yang diberikan. Tetapi dalam proses pelayanannya UPPKH telah memberikan banyak manfaat bagi RTSM. Jadi, peneliti merekomendasikan program ini harus tetap berjalan mengingat pelaksanaan program menunjukkan program sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan banyak manfaat.

Faktor penghambat pelaksanaan PKH di desa Dualasi dan Desa Baudaok Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu adalah ketidakdisiplinan penerima PKH dalam menghadiri pertemuan sosialisasi. KPM PKH yang menghadiri sosialisasi juga kadang tidak serius dalam mengikuti materi sehingga tidak mengerti prosedur yang terjadi. Selain itu, KPM menjadi terlalu bergantung pada program ini sehingga kehilangan semangat untuk bekerja. Selain itu, penggunaan dana bantuan yang tidak tepat dapat menghambat keberhasilan PKH. Uang yang seharusnya digunakan untuk pendidikan malah digunakan untuk membeli keperluan lain yang tidak terlalu mendesak sehingga Pendidikan tetap keteteran. Sejalan dengan pendapat Mellani (2022) yang menyatakan kurangnya pengawasan dan tindakan langsung dari pemerintah terkait PKH kepada anggota PKH. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui tujuan dari PKH. Masih kurangnya kesadaran dari anggota penerima PKH sehingga bantuan yang diberikan malah disalahgunakan oleh keluarga penerima manfaat dari ketentuan yaitu untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sementara itu Zulkifli (2021) menyatakan mayoritas informan KPM menggunakan dana bantuan masih belum sesuai dengan peruntukannya. Motif penyalahgunaan tersebut adalah lemahnya kondisi ekonomi KPM dan anggapan bahwa dana bantuan tersebut merupakan hak milik seutuhnya sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan. Penyalahgunaan bantuan tersebut secara tidak langsung berpengaruh pada aspek pendidikan dan kesehatan KPM sehingga masih ditemui KPM yang putus sekolah, kurang gizi dan stunting.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Evaluasi PKH di Desa Dualasi dan Desa Baudaok didasarkan pada berbagai aspek, yaitu konteks (*Context*), masukan (*Input*), proses (*Process*), dan hasil (*Product*). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam evaluasi PKH di masyarakat Desa Dualasi dan Desa Baudaok yang terdiri dari konteks (*Context*), masukan (*Input*), proses (*Process*),

dan hasil (*Product*) telah dapat terpenuhi berupa Pendidikan dan kesehatan. Bantuan yang diberikan telah mampu meringankan beban keluarga RTSM dan memberikan peluang mereka untuk dapat memutus rantai kemiskinan.

2. Dalam konteks faktor pendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), peran pemerintah desa memiliki signifikansi yang besar dalam memberikan dukungan, termasuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna mendukung kelancaran program PKH. Dukungan ini mencakup aspek finansial yang memadai serta penyediaan fasilitas dan sarana untuk kegiatan sosialisasi yang rutin dilakukan oleh pendamping PKH dan peserta PKH.
3. Faktor penghambat pelaksanaan PKH di desa Dualasi dan Desa Baudoak Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu adalah ketidakdisiplinan penerima PKH dalam menghadiri pertemuan sosialisasi. KPM PKH yang menghadiri sosialisasi juga kadang tidak serius dalam mengikuti materi sehingga tidak mengerti prosedur yang terjadi. Selain itu, KPM menjadi terlalu bergantung pada program ini sehingga kehilangan semangat untuk bekerja. Selain itu, penggunaan dana bantuan yang tidak tepat dapat menghambat keberhasilan PKH.

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Aparatur Desa, terutama Kepala Desa dan stafnya, untuk secara konsisten mendukung pelaksanaan program PKH ini, sehingga program ini dapat berjalan lancar.
2. Peserta PKH diharapkan untuk menghadiri pertemuan rutin setiap bulan guna memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai Program Keluarga Harapan.
3. Peserta PKH yang menerima bantuan diharapkan menggunakan dana tersebut dengan bijaksana, memastikan penggunaannya tidak merugikan mereka sendiri. Terutama, dana yang diterima seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan, sehingga tujuan dan cita-cita PKH dapat tercapai.
4. Pendamping diharapkan untuk terus melakukan verifikasi terhadap calon penerima PKH guna memperbarui data penerima secara berkala. Monitoring yang terus-menerus perlu dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan PKH tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mellani, WPP. 2022. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko. *eprints.ipdn.ac.id*
- Moleong, L. J. (2016). *Metedologi penelitian kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya
- Nurrohmah, I. A., & Rahaju, T. (2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Balongmasin Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. *Publika*, 7(7).
- Sugiyono, D. (2017). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Susilo, Emma Vito., Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kertasinduyasa Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Tahun 2017. Djoko Suyono. 2019. *Indonesian Governance Journal (Kajian Politik - Pemerintahan)* Vol. 2 (2).

UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Zulkifli. 2021. Penyalahgunaan Bantuan PKH: Motif dan Dampak (Studi Kasus di Gampong Bluka Teubai Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia Vol. 2, No. 2, 101-1*